

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dilakukan dalam beberapa sektor, termasuk perekonomian. Perekonomian di Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Koperasi merupakan soko guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan hakekat pembangunan nasional, diperlukan penghimpunan dana dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dan penyaluran dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Dana pensiun menyelenggarakan program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Jumlah penerima pensiun yang tercatat di bagian urusan pensiun PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung yang terdiri dari pensiunan TNI, POLRI dan ASN pada tahun 2019 di Jawa Barat mencapai 17.000 orang. Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan sistem pengendalian internal pada perusahaan yang menjadi mitra bayar sebagai penyalur dana pensiun tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sistem pengendalian internal pada pengeluaran kas sangat diperlukan oleh perusahaan. Menurut Abdul Halim (2008:321) karena begitu mudahnya uang di alihkan atau di pindah tangankan, maka kas merupakan aset yang cenderung diselewengkan atau disalahgunakan karyawan. Karena itu perusahaan harus merancang dan menggunakan pengendalian untuk mengamankan kas serta wewenang pengendalian terhadap transaksi kas.

PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai mitra bayar dana pensiun oleh PT. Taspen (Persero), salah satunya bagi peserta pensiunan Prajurit TNI, anggota POLRI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jumlah penerima pensiun Dana Pembayaran (Dapem) Induk Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) Bandung yang dibayarkan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Penerima Pensiun Dapem Induk KPRK Bandung Tahun
2017 - 2019**

Tahun	Penerima Pensiun (Orang)
2017	7.389
2018	6.846
2019	6.447

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 1.1 diatas jumlah penerima pensiun Dapem Induk KPRK Bandung yang dibayarkan setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini disebabkan adanya penerima pensiun yang meninggal dunia, sakit, sudah tidak ada ahli waris turunan dan hal lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh PT. Asabri (Persero) sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota POLRI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pembayaran dana pensiun dilakukan mulai dari tanggal 1 (satu) setiap bulannya. Tetapi nyatanya yang terjadi di mitra bayar PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung untuk pensiun bulanan khususnya Dapem Induk KPRK Bandung masih terdapat peserta pensiun yang belum mengambil atau tidak mengambil uang pensiunnya selama satu bulan bahkan sampai tiga bulan lebih. Ini berpengaruh terhadap pengeluaran kas perusahaan di mana mitra bayar belum melakukan dana pembayaran kepada peserta, sehingga adanya penghimpunan dana pensiun selama 3 (tiga) bulan sebelum dana itu dikembalikan kepada PT. Asabri (Persero) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan uang itu akhirnya dikembalikan kepada kas negara. Penghimpunan dana ini memerlukan pengawasan agar tidak terjadinya risiko kecurangan atau risiko terjadinya korupsi yang dilakukan oleh karyawan.

Berikut data realisasi pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung :

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun Dapem Induk KPRK Bandung Tahun 2017-2019

Tahun	Dropping (Rp)	Dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Pembayaran (%)
2017	200.748.852.100	196.361.639.400	4.387.212.700	97,81
2018	184.307.875.800	179.634.014.400	4.673.861.400	97,46
2019	177.175.518.800	174.635.839.500	2.539.679.300	98,57

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa realisasi pembayaran dana pensiun Dapem Induk KPRK Bandung setiap tahunnya selalu ada dana pensiun yang tidak tersalurkan. Hal ini disebabkan oleh peserta pensiun yang tidak bisa mengambil uangnya karena sakit, meninggal dunia, dan hal lain sebagainya. Ini berdampak kepada terhambatnya kebutuhan peserta pensiun jika uang pensiun belum tersalurkan kepada peserta pensiun.

Dana pensiun yang telah disalurkan sebesar 97,81% pada tahun 2017, 97,46% pada tahun 2018 dan 98,57% pada tahun 2019 tersebut pun apakah sudah benar-benar tersalurkan atau belum, karena bisa saja dana tersebut belum disalurkan dan statusnya menjadi dana fiktif. Sehingga dibutuhkan beberapa bukti untuk membuktikan dana tersebut sudah tersalurkan atau belum. Ini berdampak terhadap kehandalan informasi akuntansi.

Terkait dengan dana pensiun yang tidak diambil, PT. Asabri (Persero) mengeluarkan kebijakan mengenai uang pensiun bulanan yaitu apabila penerima

pensiun secara tunai belum/tidak mengambil selama 3 (tiga) bulan berturut-turut uang pensiunnya, maka pada bulan berikutnya pembayaran pensiunnya akan dihentikan sementara. Apabila 3 (tiga) bulan sejak dihentikannya pembayaran pensiun, penerima pensiun secara tunai masih belum/tidak mengambil uang pensiunnya, maka pada bulan berikutnya seluruh uang pensiun yang tidak diambil akan disetorkan ke kas negara. Apabila berdasarkan laporan semester dari lembaga yang ditunjuk sebagai mitra bayar terdapat penerima pensiun yang tidak mengambil uang pensiunnya, maka pada bulan berikutnya pembayaran pensiunnya akan diberhentikan sementara. Apabila 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan semester dari lembaga yang menjadi mitra bayar, penerima pensiun masih belum/tidak mengambil uang pensiunnya, maka pada bulan berikutnya seluruh uang pensiun yang belum/tidak diambil akan disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan Assisten Manager bagian urusan pensiun PT. Pos Indonesia Cabang Bandung terkadang tidak mengembalikan sisa uang yang seharusnya dikembalikan kepada PT. Asabri setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan bahwa penerima pensiun tidak mengambil uang pensiunnya. Dengan alasan mitra bayar mengetahui kondisi peserta pensiun yang tidak mengambil uang pensiunnya dikarenakan peserta pensiun sakit, sehingga mitra bayar memutuskan untuk tidak mengembalikan uangnya kepada PT. Asabri karena peserta masih berhak menerimanya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, PT. Asabri mengeluarkan suatu

kebijakan yang harus dilakukan oleh mitra bayar untuk peserta yang tidak mengambil uang pensiunnya selama 3 (tiga) bulan, yaitu dilakukannya LKPP (Layanan Kunjungan Penerima Pensiun) di mana mitra bayar melakukan survei ke setiap rumah peserta dengan tujuan untuk mengetahui alasan kenapa peserta tidak mengambil uang pensiunnya. Sehingga mitra bayar dapat mengetahui apakah peserta pensiun tersebut masih berhak atas uangnya, atau sudah tidak berhak lagi. Jika peserta masih berhak, maka mitra bayar membayarkan uang pensiunnya dengan mengisi formulir terlebih dahulu oleh peserta, sehingga uangnya dapat diterima.

PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung tidak melakukan LKPP tersebut dikarenakan peserta pensiun yang harus di LKPP berjumlah ratusan orang dan waktu yang ditentukan sangat terbatas, sehingga status ratusan peserta pensiun tersebut apakah masih berhak atau sudah tidak berhak dalam menerima uang pensiunnya. Salah satu contohnya adanya layanan kunjungan untuk mengantarkan uang pensiun peserta yang masih berhak pun tidak dilaksanakan.

Jika mitra bayar melakukan LKPP, maka pengeluaran kas setiap 3 (tiga) bulannya akan bersaldo nihil, sehingga risiko kecurangan atau risiko terjadinya korupsi yang dilakukan oleh karyawan tidak akan terjadi.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013:3) sistem pengendalian internal adalah :

“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.

Dapat diartikan pengertian sistem pengendalian internal menurut COSO

tersebut, sistem pengendalian internal adalah sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan terkait operasional, pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan.

Sehingga diperlukan adanya suatu sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas dana pensiun guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan seperti pencurian, kecurangan, korupsi maupun penyelewengan terhadap kas perusahaan mengingat adanya pengendapan uang dana pensiun setiap 3 (tiga) bulannya.

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELUARAN KAS UANG PENSUN (Studi Kasus Pada Dana Pembayaran (Dapem) Induk Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) Bandung PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, makamasalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengeluaran kas uang pensiun sesuai dengan fungsi-fungsi, dokumen dan catatan.
2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas uang pensiun.
3. Bagaimana upaya untuk memperbaiki sistem pengeluaran kas uang pensiun melalui sistem pengendalian internal.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data-data serta informasi pengeluaran kas yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana sistem pengeluaran kas uang pensiun sesuai dengan fungsi-fungsi, dokumen dan catatan, bagaimana sistem pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas uang pensiun dan bagaimana upaya untuk memperbaiki sistem pengeluaran kas uang pensiun melalui sistem pengendalian internal.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dapat dikatakan berhasil jika tujuan telah tercapai, begitu juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Sistem pengeluaran kas uang pensiun sesuai dengan fungsi-fungsi, dokumen dan catatan.
2. Sistem pengendalian internal dalam sistem pengeluaran kas uang pensiun.
3. Upaya untuk memperbaiki sistem pengeluaran kas uang pensiun melalui sistem pengendalian internal

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aspek pengembangan ilmu dan aspek guna laksana.

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi baru yang menambah wawasan tentang sistem pengendalian internal pengeluaran kas. Kemudian dapat dijadikan sebagai referensi terkait masalah yang diteliti pada

konsentrasi akuntansi keuangan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Guna Laksana

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Peneliti sendiri, yaitu memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi keuangan, khususnya mengenai topik permasalahan yang diteliti, sehingga wawasan ini dapat dipahami secara teoritis dan diimplementasikan di masyarakat (praktis).
- b. Bagi PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung, khususnya karyawan di bagian urusan pensiun, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki sistem pengeluaran kas uang pensiun.
- c. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia, agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh Institut Manajemen Koperasi Indonesia sebagai referensi dasar untuk mengambil satu langkah kebijakan yang berhubungan dengan bidang akuntansi, khususnya mengenai sistem pengendalian internal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Bandung yang beralamat di Jl. Asia Afrika Nomor 49, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan berikut ini :

Tabel 1.3 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bimbingan Penyusunan Skripsi										
2	Penelitian Lapangan										
3	Seminar Usulan Penelitian										
4	Pengumpulan Data										
5	Analisis Data										
6	Penulisan & Bimbingan BAB IV & V										
7	Kolokium										
8	Sidang Komprehensif										
9	Perbaikan Skripsi										

IKOPIN